**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDUNG**

**(Suatu Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020)**

Oleh : Istiqomah \*)

*Fiscal decentralization is a delegation of authority to the regions in managing their own financial resources so that the regions have the opportunity to manage their own households. In order to support the implementation of fiscal decentralization, the government provides an opportunity for each region to carry out regional autonomy in which the regional government has the authority to extract revenue and allocate it independently in setting development priorities. In order to carry out regional development optimally, of course the regions need sources of revenue which are not only supported by revenues originating from the Central Government or the state treasury, but must also come from revenues that exist in the regions themselves. Therefore, regional governments are required to improvise by developing regional innovations so that regional revenue sources can be maximally absorbed. The sources of regional original revenue which are also referred to as regional revenue consisting of regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management and other legitimate regional original income are expected to go hand in hand with increasing community welfare. The Regional Government of the City of Bandung is expected to be able to explore its financial sources, especially through Regional Revenue so that it is expected to have a positive effect on economic growth in the region. In the other hand, there are regional revenue sources originating from the Central Government which are called Transfer Funds, one of which is the General Allocation Fund with the aim of reducing inequality in regional financing needs with the hope that the allocation of these funds can be used effectively and efficiently by Regional Governments to increase services to the community so as to trigger an increase in economic growth in the region.*

1. **Latar Belakang Penelitian**

Perkembangandemokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen nasional untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia telah menjadi faktor penting yang mendorong pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi telah menjadi perhatian pokok dan fenomena bagi negara berkembang maupun maju. Faktanya, Banyak negara berkembang berputar haluan menuju desentralisasi fiskal sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah, serta ketidakstabilan makro ekonomi.

Desentralisasi fiskal seperti yang kita ketahui memiliki sisi positif bagi daerah terutama dalam mengatur kewenangan yang lebih besar pada pengelolaan daerah, tetapi disisi lain terdapat persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang pada dasarnya berbeda-beda. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah memiliki kesempatan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasikannya secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Agar dapat terselnggaranya pembangunan daerah tentunya dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang tidak hanya ditopang oleh penerimaan yang bersumber dari pusat atau kas negara, melainkan juga harus bersumber dari penerimaan-penerimaan yang ada pada daerah itu sendiri. Oleh karenanya, pemerintah daerah dituntut untuk berimprovisasi dengan mengembangkan inovasi-inovasi daerah agar sumber-sumber penerimaan daerah dapat terserap secara maksimal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dengan melakukan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang selanjutnya penerimaan tersebut dikelompokkan dalam APBD sebagai penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan.

Pada Pemerintah Kota Bandung sendiri terdapat sumber penerimaan yang diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah) serta Dana Perimbangan yang salah satunya bersumber dari Dana Alokasi Umum. Sementara itu, disisi lain guna merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri agar dapat menambah jumlah penerimaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi penerimaan daerah yang diharapkan dapat membatu pertumbuhan ekonomi dimana daerah tidak akan berhasil bila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendakya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

1. **Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup didalam penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
2. Dana Alokasi Umum Kota Bandung
3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
7. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang keuangan daerah
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kinerja keuangan pemerintah daerah
4. **Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka, akan dikemukakan teori-teori, penelitian-penelitian dan publikasi umum yang ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi untuk dijadikan landasan teori dalam pelaksanaan penelitian ini. Kerangka pemikiran berisi hal-hal yang berkaitan dengan paradigma penelitian penulis berdasarkan telaah pustaka dan penelitian awal, sedangkan hipotesis penelitian berisi hal-hal yang berkaitan dengan simpulan sementara atas tema yang sedang diteliti.

1. **Manajemen Keuangan Daerah**

pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Rosmery Elsye (2016:2) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah samua hak dan kewajiaban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut dengan tujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, Baldric (2017:55)

1. **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Halim (2016:45) adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Halim (2016:89) pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu, proses, output perkapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern peekonomian (*self generating*).

Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing. Sukirno (2013:35) Produk Domestik Bruto atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi/tahun =

Keterangan:

*Tahunt* = Tahun yang dihitung pertumbuhannya

*GDPt* = *Gross Domestic Proudct* tahun t

*GDPt-1*= *Gross Domestic Product* tahun sebelumnya.

Perumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

1. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji teori dan kajian pnelitian yang menjelaskan keterkaitan antar variable yang akan diteliti.

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil rill berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mempu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pendapatan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan teresbut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD pada suatu daerah harus berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Karena suatu daerah tidak bisa dikatakan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD.

Apabila yang terjadi sebaliknya maka bisa diindikasikan adanya ekspolitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima saja, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur dan meningkatkan perekonomian serta memenuhi pertumbuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada masyarakat sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat dan kemudian tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

1. **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi pemerintah daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance)* guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi kekayaan yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan semangat dalam bekerja karena telah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

**Dana Alokasi Umum (X2)**

Alokasi Dasar + Celah Fiskal

**PENDAPATAN ASLI DAERAH (X1)**

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah

Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

1. **Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dalam pemecahan masalah yang dijelaskan dalam rumusan masalah memerlukan perhitungan dan pengukuran terhadap hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017:33) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgment sampling*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

1. **Variabel Penelitian**

Identifikasi variabel perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan acuan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri dari variabel dependen/terikat (Y) dan variabel independen/bebas (X), variabel dependen/terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y), sedangkan variabel independen (X) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi umum (X2), dengan penjelasan sebagai berikut:

Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pada rawat jalan penyakit dalam Rumah Sakit Yarsi Pontianak maka diperlukan suatu definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**PAD = HPD + RD + PLPD + PLS**

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Derah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba

PLS = Pendapatan Lain yang sah

1. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

**DAU = AD + CF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan: |  |  |
| DAU | = | Alokasi DAU per daerah |
| AD | = | Alokasi DAU berdasar alokasi dasar |
| CF | = | Alokasi DAU Berdasar Celah Fiskal |

1. Pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), yang berhubungan dengan adanya desentralisasi fiskal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan rumus:

**Pertumbuhan**

1. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pada Instansi Pemerintah Kota Bandung dengan teknik pengambilan sampeldalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, ada bermacam-macam cara yang dikemukakan para ahli, diantaranya dengan menggunakan metode Slovin (Rully Indrawan, 2016)

n=

keterangan:

n = ukuran sample

N = ukuran populasi

D = tingkat ketidakpercayaan yang diinginkan

Maka perhitungan sampel dalam penelitian adalah ;

n=

n= 30

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data terbagi atas dua golongan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh secara langsung. Angket adalah teknik pengumpulan data primer yang sangat populer dalam pendekatan.

1. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dan kajian kepustakaan (literatur), didefinisikan sebagai penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber pendukung untuk kepentingan penelitian yang sedang dijalankan (Rully Indrawan, 2016:143). Data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah oleh pihak lain (Umar, 2010:130).

1. **Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pertumbuhan ekonomi.

1. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan sebelum dilakukan regresi untuk menghasilkan nilai parameter penduga. Cara yang digunakan untuk menguji gejala penyimpangan asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2017:65).

1. **Uji Multikolinearitas**

Pengujian ini menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel independen, maupun untuk menunjukkan ada tidaknya kolinearitas yang tinggi diantara variabel independen.

Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari VIF *(variance inflation factor)* dari masing–masing variabel.

Ho = tidak terjadi multikolinearitas antar variabel-variabel bebas

H1= terjadi multikolinearitas antar variabel-variabel bebas

Dengan kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

Jika nilai toleransi < 0,10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas

Jika nilai toleransi > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas

1. **Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Sugiyono, 2017). Uji statistik dapat menyesatkan, maka dilakukan juga uji grafik, yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan ploting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, Sugiyono (2017:57).

1. **Uji Autokolerasi**

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahaan penggangguan tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

1. **Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Rancangan analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variable independen. Analisis regresi dihasilkan dengan cara memasukkan input data variabel ke dalam fungsi regresi. Model persamaan regresi linier berganda yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Y1 = α + β1X1 + β2X2 + e**

Keterangan :

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

*e =* tingkat kesalahan pengganggu (error)

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas *(independent variable)* terhadap variabel terikat *(dependent variable)*, baik uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), atau uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F). Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (Uji R) untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi.

**XV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Uji Multikolinearitas**

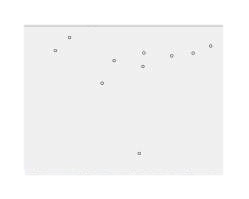
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Akibatnya, tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam regresi yang dapat ditentukan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized  Coefficients | T | Sig. | Collinearity  Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1(Constant) | 18094.369 | 86122.077 |  | .210 | .840 |  |  |
| PAD | 87624.108 | 41389.032 | 1.041 | 2.117 | .072 | .286 | 3.502 |
| DAU | -3.479 | 4.026 | -.425 | -.864 | .416 | .286 | 3.502 |

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedasitisas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk memprediksi heterokedasitisas dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot*. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedasitisas pada penelitian ini, dapat dilihat pada gamba dibawah ini:

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Karena titik-titik data menyebar dan berada di bawah angka 0, titik- titik data tidak terkumpul secara eksklusif di atas dan di bawah, dan sebarannya tidak membentuk pola, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian regresi linier berganda ini.

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan pengujian dengan mengunakan metode pendekatan *Kolmogorow-Smiwow* untuk mengentahuii nilai yang didaptakan apakah berdistribusi normal atau tidak dengan tolak ukur cakupan nilai yang menjadi suatu tahapan yang dilakukan. Adapun dasar pengambilan uji *Kolmogorow-Smiwow* yaitu :

1. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Unstandardized  Residual |
| N |  | 10 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
|  | Std. Deviation | 41382.25170415 |
| Most Extreme | Absolute | .184 |
| Differences | Positive | .184 |
|  | Negative | -.178 |
| Test Statistic |  | .184 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) |  | .200c,d |

Dari tabel diatas menujukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang diperoleh maka berdistribusi normal nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linier. Masalah autokorelasi terjadi ketika ada korelasi. Uji autokolerasi digunakan dengan ambang signifikansi 0,05 untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi yakni dengan memakai *running test.* Dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan tes, yakni:

1. Bila nilai Asymp. Sig (2-tailed) < dari 0,05, ada gejala autokorelasi.
2. Bila nilai Asymp. Sig (2-tailed) > dari 0,05 tidak ada gejala autokorelasi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Unstandardized Residual |
| Test Valuea | 8684.07099 |
| Cases < Test Value | 5 |
| Cases >= Test Value | 5 |
| Total Cases | 10 |
| Number of Runs | 4 |
| Z | -1.006 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .314 |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan nilai sebesar 0,314 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan tersebut (*random*). Dapat diketahui bahwa koefisien bebas dari gangguan dan gejala autokorelasi.

1. **Hasil Analisis Regresi Berganda**

Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Untuk melihat apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, bisa menguji model regresi berganda dengan SPSS 22. Berdasarkan dari data yang didapatkan maka untuk melihat apakah terdapat suatu pengaruh dan melihat jumlah besaran nilai yang menjadi acuan utama dalam menetukan nilai yang didapatkan. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian model regresi dengan hasil sebagai berikut:

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficientsa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized  Coefficients | | Standardized  Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 17.753 | 123.182 |  | .144 | .889 |
| PAD | 78.088 | 35.061 | .926 | 2.844 | .012 |
| DAU | -3.031 | .065 | .319 | -2.768 | .468 |

Dari tabel Hasil uji regresi linear berganda didapatkan persamaan regresi, yakni, dari hasil uji regresi diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 17,53 + 17,088 = 3,031

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | = | Pertumbuhan Ekonomi | X1 | | Pendapatan Asli Daerah |
|  |  |  | X2 | | Dana Alokasi Umum |
| β0 | = | Konstanta |  |  | |
| β1  β2 | =  = | Koefisien regresi  Koefisien regresi | ɛ | = Eror Term | |

1. Berdasarkan persamaan regresi menujukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 17,753 Menujukkan bahwa apabila variabel lain mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 17,753%
2. Berdasarkan hasil penelitian dan uji regresi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung bernilai positif sebesar 17,088, yang artinya bahwa setiap kenaikan 1% Pendapatan sli Daerah Maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 17,088%.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan uji regresi Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kota Bandung bernilai negatif sebesar -3,031, yang artinya bahwa setiap kenaikan sebesar 1% Dana Alokasi Umum maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -3,031%.
4. **Hasil Uji Hipotesis**
5. Uji (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi (R2) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan fluktuasi variabel. Koefisien determinasi memiliki nilai nol atau satu. Uji koefisien determinasi (R2) menentukan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan variasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian R square sebagai salah satu metode perhitungan untuk mencari nilai yang mendekati satu variabel bebas yang menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Hasil Uji koefisien Determinasi**

**Model Summaryb**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R  Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .711a | .664 | .632 | 47.46953 |

sesuai dengan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil nilai adjusted R Square (koefisien determinasi) yakni 0,632 artinya dampak variabel independen (X) bagi variabel dependen (Y) yakni 63,2%, sementara sisanya 36,8% dipengaruhi dari faktor-faktor lain yang menjadi aspek penting dalam mempengaruhinya.

1. **Uji Simultan (Uji F)**

Menurut (Karlina, 2017) uji signifikan F (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. dari hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVAa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Squae | F | Sig. |
| 1 Regression | 16105.730 | 2 | 8052.865 | 13.574 | .004b |
| Residual | 15773.494 | 7 | 2253.356 |  |  |
| Total | 31879.224 | 9 |  |  |  |

Dari hasil uji regresi dapat disimpulkan:

1. Menurut Nilai Signifikansi dari Outpot Anova

Dari tabel keluaran SPSS, nilai sig yakni 0,004. Sebab nilai signifikansi sebesar 0,004 <0,05 maka disimpulkan bahwa variabel independen berdampak signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara keseluruhan.

1. Menurut Perbandingan Nilai F-Hitung dan F-Tabel

Dari tabel keluaran SPSS, nilai F hitung yakni 13,574. Sebab nilai F- hitung sebesar 13,574 > F-tabel 4.07, disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1. **Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian dilakukan dengan menguji secara parsial (individual) variabel independen untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficientsa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized  Coefficients | | Standardized Coefficients | t |  | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |
| 1 (Constant) | 17.753 | 123.182 |  | .144 |  | .889 |
| PAD | 78.088 | 35.061 | .926 | 2.844 |  | .012 |
| DAU | -3.031 | .065 | .319 | -2.768 |  | .468 |

Berdasarkan hasil Uji Parsial (Uji t) melalui analisis regresi, diperoleh hasil variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

* + - 1. **Uji parsial Pendaptan Asli Daerah (Uji t )**

Dilakukan uji parsial Pedanapatan Asli Daerah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1 ) bagi Pertumbuhan Ekonomi (Y).

1. Menurut Nilai Signifikansi (Sig)

Dari tabel keluaran Koefisien SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) yakni 0,012, sebab nilai Sig 0,012 < dari probabilitas 0,05 maka disimpulkan atau hipotesis pertama diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan bagi Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung (Y).

1. Menurut Nilai t-hitung dan t-tabel

Berdasarkan perbadingan nilai dengan hasil yang ditunjukkan pada nilai >(2,844 >2.446) sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ditolak dan diterima. Menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

* + - 1. **Uji Parsial Dana Alokasi Umum ( Uji t )**

Uji parsial Dana Alokasi Umum dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung (Y).

1. Berdasarkan Nilai Signifikasi (Sig)

Dari tabel output Koefisien SPSS, nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 0,468. Karena nilai Sig dari probabilitas 0,05 > 0,468, maka atau hipotesis kedua ditolak. Artinya, Dana Alokasi Umum (X2) tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi (Y) Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1. Berdasarkan Nilai t-hitung dan t-tabel

Maka Berdasarkan perbadingan nilai dengan hasil yang ditunjukkan pada nilai > (-2,728 < 2.446) sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa diterima dan ditolak. Menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

**Pembahasan Analisis Deskriptif**

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.**

Dari hasil pengujian, diketahui nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) yakni 0.016 < dari probabilitas 0,05, nilai t- hitung Pendapatan Asli Daerah (X1) yakni 2.844 > dari t-tabel 2.446, maka disimpulkan atau hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Artinya setiap kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah akan menambah nilai Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung yakni sebesar 17,088.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Secara teori Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Maka, semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan berpengaruh pada semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya semakin kecil pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan akan berpengaruh pada menurunnya angka pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini disebabkan adanya komponen didalam pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan indikator dari PDRB yang akan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB. Keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Karena jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka anggaran belanja pada pemerintah daerah juga akan semakin besar sehingga akan memicu pembangunan daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

1. **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.**

Dari hasil pengujian, nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (X2) yakni 0,468. > dari probabilitas 0,05, dan nilai t-hitung Dana Alokasi Umum (X2) yakni -2.728, karena t-hitung -2.728 < dari t-tabel 2.446, maka disimpulkan ditolak atau hipotesis kedua ditolak. Dapat diartikan bahwa tidak ada dampak secara lansung antara Dana Alokasi Umum (X2) bagi Pertumbuhan Ekonomi (Y). Artinya kenaikan 1% Dana Alokasi Umum (X2) akan mengurangi nilai Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung (Y) yakni sebesar - 3.031.

Meskipun Dana Alokasi Umum yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat mengalami kenaikan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sebab persentase belanja modal yang dialokasikan pada Dana Alokasi Umum sangat terbatas dan juga terbagi untuk membiayai belanja lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya yang tidak memiliki hubungan secara lansung dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Semakin tingginya pengalokasian realisasi Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena Dana Alokasi Umum secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah. Hal ini karena peran dari Dana Alokasi Umum untuk pembangunan sarana prasarana, pelayanan publik ataupun pengadaan lapangan kerja memiliki persentasi yang terbatas, karena tujuan penting dari Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan pemerintah, yang mana persentase pengalokasian pada daerah yang dikatakan sebagai daerah yang cukup maju tentu akan lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang tertinggal sehingga fokus pengalokasian dana pada Dana Alokasi Umum tidak serta merta untuk meningkatkan laju pembangunan daerah karena daerah yang telah maju dianggap cukup mandiri dan mampu mengatur sendiri urusan rumah tangganya yang sumbernya dapat terpenuhi melalui Pendapatan Asli Daerah.

Sebaliknya, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi missalokasi. Penentuan dana alokasi umum dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah. Hal ini mengindikasi jika terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum maka kemandirian suatu daerah akan semakin rendah.

**XX. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.**

Pada uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi membuktikan bahwa secara simultan variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dari tabel keluaran SPSS, nilai F hitung yakni 13,574. Sebab nilai F- hitung sebesar 13,574 > F-tabel 4.07, disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan tedapat pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan/bersama terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat diterima.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakatnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dinilai cukup signifikan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pembiayaan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pembangunan dan pelayanan publik ke pada masyarakat.

1. **Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh melalui sumber-sumber kekayaan daerah itu sendiri yang digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah memiliki 4 (empat) komponen yang diantaranya terdiri dari Pajak Daerah, Retibusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terbesar untuk Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2018 s.d 2020 diperoleh melalui Pajak Daerah dan yang terkecil bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, namun selama kurun waktu tersebut total Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
2. Dana Alokasi Umum yang mana merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah salah satu dana transfer yang peruntukannya digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendanai belanja pegawai maupun belanja modal ataupun belanja pemeliharaan. Dana Alokasi Umum dari tahun 2018 s.d 2020 untuk Pemerintah Kota Bandung terbesar diperoleh pada tahun 2019 dengan pengalokasian yang berbeda pada setiap tahunnya.
3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Selama tahun 2018 s.d 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung terus mengalami penurunan terutama pada tahun 2020.
4. Nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas signifikansi (0,016 0,05), menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung Selanjutnya, perbandingan antara t- hitung dan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t- tabel (t-hitung 2,844 > t-tabel 2,446).
5. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari probabilitas signifikansi (0,468 > 0,05). Selanjutnya, perbandingan t-hitung dan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari t- tabel (t-hitung -2,728 vs t-tabel 2,446). Artinya setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum menurunkan nilai Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung.
6. Secara simultan variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dari tabel keluaran SPSS, nilai F hitung yakni 13,574. Sebab nilai F- hitung sebesar 13,574 > F-tabel 4.07.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat lebih menggali potensi-potensi yang dapat menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta lebih dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh secara bijak dan tepat sasaran, sehingga diharapkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang memadai Pemerintah Daerah dapat membiayai secara mandiri kebutuhan rumah tangga pemerintahannya tanpa menggantungkan diri pada Pemerintah Pusat, karena dengan kemandirian daerah tersbut tentunya Pemerintah Daerah dapat menjalankan roda pembangunannya dan tentunya telah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri.
2. Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat mengalokasikan Dana Alokasi Umum dengan lebih efektif dan sebaik-baiknya guna meningkatkan mutu kualitas kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan anggaran yang sesuai kebutuhan kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.
3. Guna meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik.Penerbit Salemba Empat,   
 jakarta.

Agus, Sartono. 2015. ManajemenKeuangan:TeoridanAplikasi. Edisi Keempat.   
 BPFE. Yogyakarta.

Anggoro, Damas Dwi. 2017, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.: UB Press.:   
 Malang

Anshor Wibowo, Monalisa. 2019. Pengaruh Belanja Modal, dengan Pendapatan   
 Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan   
 Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalin. Jurnal Akuntansi Syariah   
 ISSN 2549-3086

Ardansyah Putra Harahap. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja   
 modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang. Jurnal   
 Bisnis Net. ISSN 2021 - 3982

Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit UPP STIM YKPN.   
 Yogyakarta.

Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan   
 Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional: Yayasan Pustaka Obor   
 Indonesia: Jakarta

Dedy Arifuddin Setiawan, Harsono.2020. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli   
 Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di   
 Kabupaten Pamekasan Journal of Regional Economics Indonesia ISSN   
 2342-1657

Desak Gede 2017. Pengaruh pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah,   
 Belanja Modal,dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggran   
 Terhadap Alokasi Belanja Modal di seluruh Bali Jurnal Krisna Kumpulan   
 Akuntansi. ISSN: 2301-8879

Eka Putri, Zuwesty. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana   
 Alokasi Umum (DAU) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di   
 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Manajemen. UIN   
 Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 5, No. 2. EPMA Vol.10, No. 1 April hal.   
 19 – 27.

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1).   
 Kebumen: Mediatera.

Ginting, Rahmi. 2017. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli   
 Daerah,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap   
 BelanjaModal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi   
 Riau)”.Jurnal JOM Fekon, Vol. 4 No. 2.

Husnan, Suad, dan Enny Pudjiastuti. 2015. Dasar-dasar Manajemen Keuangan   
 Edisi Ke Tujuh.: UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta.

Muti’ah 2017. *The Effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Fund, General   
 Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic   
 Growth (Empirical Study In the 33 provinces in Indonesian Year 2011-  
 2014)* Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697

Muhammad Dedy Palguno\*¹, Devi Valeriani¹, & Suhartono². 2020. Pengaruh   
 Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan   
 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. Sorot   
 Jurnal ilmu –ilmu akuntansi ISSN 1907- 364X

Muh. Resa Saputra1 , Haliah2 , Aini Indrijawati. 2021. Pengaruh Belanja Modal   
 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah   
 sebagai Variabel I ntervening Jurnal Bisnis dan Akuntansi ISSN: 1979-  
 1712

Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Nordiawan, D. (2016). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat. Jakarta.

Oby, Paulus dan Rosalina. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi   
 umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota   
 Tomohon, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol 19   
 No 3

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Sarinah., Mardalena. (2017). Pengantar Manajemen. CV Budi Utama.Yogyakarta.

Siregar, Baldric. 2017 Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah   
 Daerah Berbasis Akrual).: UPP STIM YKPN Yogyakarta

Siti Hasanah. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal   
 terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur Jurnal Ilmu dan Riset   
 Akuntansi. ISSN 2460- 0585

Stephen, Robbins (2015), PerilakuOrganisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Alfabeta,   
 CV. Bandung.

Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja   
 Grafindo Persada, Jakarta.

Sutrisno, Edy. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima.: Prenada   
 Media Yogyakarta

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah